

ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

*ANALYSIS OF REGISTRATION AND FINANCIAL REPORTING AT THE TECHNICAL IMPLEMENTATION
UNIT IN PROVINCIAL GOVERNMENT NORTH SULAWESI*

Oleh:

Ria Valentina Pajouw¹

Agus T. Poputra²

Dhullo Afandi³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas Sam Ratulangi Manado

email: ¹pajouwvalentina@yahoo.com

²atpoputra@yahoo.com

³afandiafandibaksh@gmail.com

Abstrak: Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan akuntansi terhadap transaksi ekonomi yang terjadi pada bagiannya, hingga menghasilkan laporan keuangan. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan salah satu entitas pemerintah yang menyajikan laporan keuangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pencatatan dan pelaporan keuangan pada UPTD Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan teknik wawancara, teknik studi dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan proses pencatatan akuntansi, serta pelaporannya telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010. Pada tahun anggaran berikutnya, sebaiknya pimpinan UPTD Metrologi terus mempertahankan penyajian laporan keuangan sesuai amanat PP yang berlaku dengan transparan dan tepat waktu sehingga dapat dipergunakan bagi pengguna laporan guna pengambilan keputusan.

Kata kunci: *pencatatan pelaporan keuangan, peraturan pemerintah*

Abstract: Each unit (SKPD) implement accounting for economic transactions that occur in part, to produce financial statements. Technical Implementation Unit (UPTD) is a government entity that serves the financial statements. The purpose of this study to determine the financial recording and reporting on UPTD Metrology Department of Industry and Commerce in accordance with Government Regulation (PP) No.71 in 2010. This study used a descriptive method. Data collection methods used interview techniques, engineering documentation and observation studies. The results showed that UPTD Metrology Department of Industry and Trade has made the process of accounting records, and reporting in accordance with the PP.71 in 2010. In the next fiscal year, should continue to maintain its leadership UPTD Metrology presentation of financial statements in accordance with applicable government regulations mandate a transparent and timely manner so that it can be used for decision-making in order to report users.

Keywords: *recording of financial reporting, government regulations*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua UU tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah. Dalam sistem pemerintah daerah terdapat dua subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SPKPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun laporan keuangan SKPKD. Oleh karena itu, setiap SKPD beserta jajaran dibawahnya harus menyusun laporan keuangan sebaik mungkin.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (*reliable*) serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum dan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah direvisi dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan amanat UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah telah menetapkan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional. UPTD Metrologi adalah salah satu bagian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai SKPD yang ada di wilayah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, sekaligus pengguna anggaran yang harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan amanat PP yang mengatur mengenai standar akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pencatatan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan pada UPTD Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

PP RI No. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (2), menyatakan bahwa akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Konsep Akuntansi Pemerintahan

Nordiawan dan Hertianti (2010:65), menyatakan bahwa definisi tentang sektor publik dalam perkembangannya menjadi perdebatan sendiri, khususnya sejak disiplin ilmu akuntansi sektor publik berkembang. Istilah publik sendiri memiliki makna yang berbeda di setiap bidang ilmu yang berbeda. Pengertian publik di bidang ekonomi tentu berbeda dengan pengertian publik di ranah politik, hukum, atau lainnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan

PP RI No. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3), menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Kandungan Standar Akuntansi Pemerintahan

Tanjung (2012:20) memaparkan yang termasuk dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut.

1. PSAP 01: Penyajian Laporan Keuangan.
2. PSAP 02: Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas.
3. PSAP 03: Laporan Arus Kas.
4. PSAP 04: Catatan atas Laporan Keuangan.
5. PSAP 05: Akuntansi Persediaan.
6. PSAP 06: Akuntansi Investasi.
7. PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap.
8. PSAP 08: Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan.
9. PSAP 09: Akuntansi Kewajiban.
10. PSAP 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan.
11. PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasian.
12. PSAP 12: Laporan Operasional.

Laporan Keuangan Daerah

PP RI No. 71 Tahun 2010, menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Hariadi, Restianto, dan Bawono (2010:122) menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, serta membantu ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP (Akrual) menyebutkan bahwa peranan laporan keuangan adalah sebagai berikut.

1. Akuntabilitas.
2. Manajemen.
3. Transparansi.
4. Keseimbangan Antar Generasi.
5. Evaluasi Kinerja.

Komponen-Komponen dalam Laporan Keuangan Daerah

Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 tentang Unsur Laporan Keuangan menyatakan bahwa komponen laporan keuangan terdiri sebagai berikut.

1. Laporan Realisasi Anggaran.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
3. Neraca.
4. Laporan Operasional.
5. Laporan Arus Kas.
6. Laporan Perubahan Ekuitas.
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pencatatan dan Pelaporan Keuangan UPTD

Laporan yang dihasilkan oleh UPTD adalah berupa Laporan Realisasi Anggaran atau lebih dikenal dengan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan, juga Buku Kas Umum. Untuk mewujudkan laporan pertanggungjawaban yang akuntabilitas serta transparan, maka UPTD harus mencatat dan melaporkan laporan keuangan tersebut sesuai PP yang berlaku mengenai standar akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah. Dalam PP No. 71 Tahun 2010 yang didukung dengan disahkannya Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang penyajian laporan keuangan berbasis akrual, transaksi akan dicatat ke dalam 2 jenis jurnal, yaitu Jurnal Anggaran dan Jurnal Finansial.

Penelitian Terdahulu

1. Harianja (2008) dengan judul Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem akuntansi pemerintahan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintah Kabupaten Toba Samosir sudah sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan PP No. 24 Tahun 2005. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang dimulai untuk tahun anggaran 2007.
2. Pasaribu (2011) dengan judul Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan SKPD. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis penyajian laporan keuangan SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD sebagai faktor yang berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan SKPD. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan SKPD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dimana peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian, yaitu UPTD Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pada penyajian laporan keuangannya.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada UPTD Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November 2014.

Prosedur Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan tahap penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Tahapan-tahapan tersebut dipaparkan sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi permasalahan yang ada untuk dipecahkan melalui metode deskriptif.
2. Merumuskan permasalahan yang ada dan menentukan tujuan serta manfaat penelitian.
3. Mengumpulkan sejumlah informasi mengenai gambaran umum yang berkaitan dengan instansi dan data mengenai penyajian laporan keuangan pada UPTD Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
4. Melakukan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui penyajian laporan keuangan UPTD Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan apakah telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.
5. Menarik sebuah kesimpulan yang logis berdasarkan hasil penelitian tersebut dan memberikan saran yang membangun pada UPTD Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian antara teori yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam studi lapangan ini menggunakan tiga cara yaitu wawancara langsung, studi dokumentasi dan pengamatan/ observasi.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis ini dimulai dengan langkah mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Adapun data-data yang diperoleh berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang selanjutnya dilihat kesesuaiannya dengan PP No. 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI dan Buku Kas Umum (BKU) akan dilihat kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 73 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja kemudian dianalisis penerapannya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Provinsi Sulawesi Utara terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dengan ibu kota yang terletak di kota Manado. Provinsi ini berada di sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Gorontalo yang merupakan hasil pemekaran wilayah dari provinsi Sulawesi Utara. Sementara kepulauan Sangihe dan Talaud merupakan bagian utara dari provinsi ini yang berbatasan dengan Davao del Sur di negara Filipina.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu SKPD yang ada di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Berdasarkan UU No. 02 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, pengertian metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas. Salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian yang ada di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yaitu UPTD dibawah binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut UPTD Metrologi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2006. Fungsi dan peran UPTD Provinsi Sulawesi Utara adalah untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukur, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di masyarakat di Provisinsi Sulawesi Utara sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 02 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2006 dalam bab III pasal 6 menyatakan bahwa, susunan organisasi dinas terdiri dari: kepala dinas, wakil kepala dinas, bagian tata usaha, bidang-bidang, sub bagian, seksi-seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional. Struktur organisasi yang terdapat dalam UPTD Metrologi terdiri dari: Kepala UPTD, Kasubag Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Hasil Penelitian

Kesesuaian Pencatatan dan Pelaporan Realisasi Anggaran UPTD Metrologi Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010

Berikut dipaparkan beberapa transaksi beserta dengan pencatatan/penjurnalan yang disajikan oleh UPTD Metrologi:

1. Pembelian barang dan jasa untuk konsumsi, yaitu pembelian alat tulis kantor yang dibayar secara LS dicatat dalam dua jurnal:

a. Jurnal Finansial:

Beban Persediaan ATK	17.595.000,00	
RK-PPKD		17.595.000,00

b. Jurnal Anggaran:

Belanja ATK	17.585.000,00	
Estimasi Perubahan SAL		17.595.000,00

2. Tagihan belanja barang dan jasa berupa langganan daya dan jasa untuk bulan Juni 2014 yang belum terbayarkan dicatat dalam jurnal:

a. Jurnal Finansial:

Beban Jasa Listrik	8.051.864,00
Utang Belanja Jasa	8.051.864,00

Selanjutnya akan dilampirkan kesesuaian pelaporan dalam realisasi anggaran yang terdiri dari pos pendapatan dan belanja yang disajikan oleh UPTD Metrologi sesuai PP No. 71 Tahun 2010:

1. Pelaporan Pendapatan

Berikut diperlihatkan pelaporan pendapatan yang telah sesuai dengan PP No. 71 yang disajikan dengan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah oleh UPTD Metrologi dalam Laporan Realisasi Anggaran:

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan

No. Urut	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)
1	Pendapatan	175.000.000	47.398.000	(127.602.000)
1 . 1	Pendapatan Asli Daerah	175.000.000	47.398.000	(127.602.000)
1 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	175.000.000	47.398.000	(127.602.000)

Sumber: UPTD Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2014

2. Pelaporan Belanja

Berikut diperlihatkan pelaporan belanja yang telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun yang disajikan oleh UPTD Metrologi dalam Laporan Realisasi Anggaran:

Tabel 2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja

No. Urut	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)
2	Belanja	4.868.531.000,00	590.830.868,00	(4.277.700.132,00)
2 . 1	Belanja Operasi	892.991.000,00	369.188.868,00	(523.692.132,00)
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	103.200.000,00	35.966.000,00	(67.234.000,00)
2 . 1 . 2	Belanja Barang	789.681.000,00	333.222.868,00	(456.458.132,00)
2 . 2	Belanja Modal	3.975.650.000,00	221.642.000,00	(3.754.008.000,00)
2 . 2 . 2	Belanja Peralatan dan Mesin	3.946.150.000,00	221.642.000,00	(3.754.508.000,00)
2 . 2 . 4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)
2 . 2 . 5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)

Sumber: UPTD Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2014

Kesesuaian Pencatatan dan Pelaporan Buku Kas Umum UPTD Metrologi Berdasarkan PMK No. 73 Tahun 2008

Hasil penelitian selanjutnya adalah mengenai Buku Kas Umum UPTD Metrologi, penyajian buku kas umum yang dihasilkan adalah berupa pencatatan *single entry* atau biasa disebut dengan pencatatan tata buku tunggal. Berikut diperlihatkan penyajian Buku Kas Umum UPTD Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memaparkan sebagian transaksi:

Tabel 3. Buku Kas Umum

No.	Tanggal	No. Bukti	Kode Rek.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	02/06/14	22/PAD/Indag -Met/VI/2014	4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.108.500,00	
2		22/STS/Indag- Met/V/2014	4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		5.108.500,00
3	09/06/14	23/PAD/Indag -Met/VI/2014	4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.033.000,00	
4		23/STS/Indag- Met/VI/2014	4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		2.033.000,00

Sumber: UPTD Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2014

Pembahasan

Kesesuaian Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan PMK No. 73 Tahun 2008

Tahap pertama yang akan dilakukan dalam pembuatan laporan keuangan yaitu melakukan pencatatan (penjurnalan) transaksi mulai dari awal hingga akhir periode tahun anggaran. Dalam PP No 71 Tahun 2010 yang didukung dengan disahkannya Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang penyajian laporan keuangan berbasis akrual, maka transaksi akan dicatat ke dalam 2 jenis jurnal, yaitu Jurnal Anggaran yang merupakan pencatatan yang dilakukan untuk seluruh kegiatan operasional yang bersumber dari anggaran (APBD) selama periode tertentu yang berpengaruh pada akun beban dan estimasi perubahan saldo anggaran lebih yang akan menghasilkan laporan operasional serta Jurnal Finansial yang merupakan jurnal untuk mencatat kegiatan yang berpengaruh pada akun belanja, rekening kas pejabat pengelola keuangan daerah dan kas di bendahara pengeluaran yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Berdasarkan pencatatan yang telah dipaparkan berdasarkan beberapa transaksi, dapat dilihat bahwa pencatatan dalam Jurnal Finansial dan Jurnal Anggaran yang dilakukan oleh UPTD Metrologi telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010. Selanjutnya mengenai pelaporan dalam laporan realisasi anggaran serta pencatatan dan pelaporan dalam buku kas umum akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Pendapatan adalah semua penerimaan kas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode semester atau tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui pada saat penerimaan kas.
2. Jenis Pendapatan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran UPTD Metrologi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Pendapatan asli daerah salah satunya meliputi pendapatan retribusi daerah.
4. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan Bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
5. Pelaporan pendapatan yang dilakukan oleh UPTD Metrologi telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 berbasis akrual, yang bisa dilihat dari pencatatan akun pendapatan retribusi daerah kedalam Pendapatan Asli Daerah.
6. Belanja adalah semua pengeluaran kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.
7. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan.
8. Pada Laporan Realisasi Anggaran UPTD Metrologi, belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, yaitu belanja operasi, belanja modal.
9. Belanja operasi meliputi belanja pegawai dan belanja Barang.

10. Belanja modal meliputi belanja peralatan dan mesin, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya.
11. Pelaporan belanja yang dilakukan oleh UPTD Metrologi telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang pencatatan berbasis akrual, yang bisa dilihat dari pencatatan akun belanja yang terdiri atas belanja operasi meliputi belanja pegawai dan belanja pegawai dan belanja modal yang meliputi belanja peralatan dan mesin, belanja jalan, irigasi dan jaringan serta belanja aset tetap lainnya.
12. Penggunaan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali.
13. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan (debit).
14. Transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran (kredit).
15. Pencatatan dan pelaporan Buku Kas Umum yang dilakukan oleh UPTD Metrologi telah sesuai dengan PMK No. 73 Tahun 2008.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Laporan keuangan yang dihasilkan UPTD Metrologi adalah berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Buku Kas Umum. Pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh UPTD Metrologi telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010. Karena penyajian LRA dari UPTD yang bersangkutan telah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan dengan sebagaimana mestinya.
2. Mengenai Buku Kas Umum UPTD Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, penyajian buku kas umum yang dihasilkan adalah berupa pencatatan *single entry* atau biasa disebut dengan pencatatan tata buku tunggal yang dilihat telah sesuai dengan PMK No. 73 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Lebih meningkatkan kualitas SDM para pegawai terutama pada subbagian akuntansi dan pelaporan, melalui sosialisasi peraturan baru, pengadaan diklat, maupun bimbingan teknis yang mendukung SDM agar bisa memahami mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan, sistem akuntansi yang digunakan, serta komponen laporan keuangan yang dihasilkan. Pemahaman terhadap hal-hal tersebut saling terkait satu sama lainnya dalam menyusun laporan keuangan pemerintah.
2. Diharapkan agar UPTD Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk terus membuat dan melaporkan laporan keuangan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku serta mempertahankan transparansinya dalam menyajikan laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hariadi, Pramono., Restianto, Yanuar E., Bawono, Icut Rangga., 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Harianja, Rioldinar. 2008. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Universitas Sumatera Utara, Medan. *Skripsi*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26877/6/Cover.pdf>. Diakses pada 25 November 2014. Hal 1- 12.
- Nordiawan, Deddi dan Hertianti, Ayuningtias. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Pasaribu, Frans Judika. 2011. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan SKPD. Universitas Sumatera Utara. Medan. *Tesis*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27580/7/Cover.pdf>. Diakses pada 25 November 2014. Hal. 1-16.

- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 04 Tahun 2006 *Tentang Dinas Pekerjaan Umum*, Manado.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 *Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2008 *Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja*, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 02 Tahun 1981 *Tentang Metrologi Legal*, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta.
- Tanjung, A. Hafiz, 2012. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual*. Alfabeta, Bandung.